



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pencapaian Target/ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Balangan perlu disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Tahun 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor



- 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMNET GOALS* TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Balangan.
7. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustanaible Depelopment Goals* yang selanjutnya disingkat Matriks RAD TPB/SDGs adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* yang berisikan Target TPB/ SDGs, Indikator



TPB/ SDGs, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Balangan.

BAB II MATRIKS RAD TPB/SDGs

Pasal 2

Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Pasal 3

Matriks RAD TPB/SDGs adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Matriks RAD TPB/ SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam upaya pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.

BAB III KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Tim Koordinasi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals*(SDGs) Kabupaten Balangan melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 dilaksanakan



sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jika dalam perkembangan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 terdapat evaluasi pada Matriks ini, Tim Koordinasi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Balangan dapat melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 kepada Bupati Balangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang selanjutnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam Dokumen laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



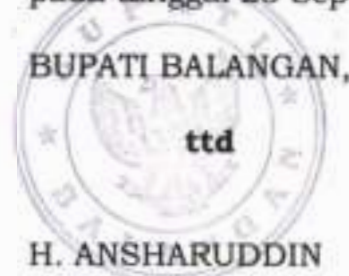
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 23 September 2019



Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 43 Tahun 2019
 TENTANG
 MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 - 2021

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MELUASIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)											
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan proksi								
	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	PUPR	km	1.437	1,6	1	1	1	PUPR
	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
				PUPR	SR	1000	180	200	250	280	PUPR
				PUPR	m	252782	7000	10000	13000	15000	PUPR
				PUPR	SR	0	360	360	400	420	PUPR

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	6.5.1 (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkatkan jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							

Tertarget	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2020	2021		
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	6.5.1 (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	6.5.2	Proporsi wilayah cakupan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	Indikator global yang akan dikembangkan								
	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	6.6.1 (a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.6.1 (b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.6.1 (c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.6.1 (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang diindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan								
	6.a Pada tahun 2020, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemenuhan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang										

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan							
	TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)									
	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Perkim	Unit	18	45	45	45	Perkim
	11.1.1 (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	11.1.1 (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Perkim	Lokasi	1	1	1	1	Perkim
				Perkim	Lokasi	0	-	3	3	Perkim
				Perkim	Lokasi	14	10	10	10	Perkim
				Perkim	Lokasi	0	-	3	3	Perkim

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
11.4 Mempromosikan dan menjaga budaya dunia dan warisan alam dunia	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Indikator global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan							
	11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai prospek indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	11.5.1 (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	11.5.1 (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Indikator global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Setuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.							
	TUJUAN 12 (KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB): MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes of Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien	12.2.1	Jejak material (material footprint).	Indikator global yang akan dikembangkan						
	12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).	Indikator global yang akan dikembangkan							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Status Pelaksanaan
							2018	2019	2020	
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global setengahnya limbah pangan di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Indikator global yang akan dikembangkan							
	12.4	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Indikator global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan							
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya	Indikator global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan							
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali	12.4.2 (b)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	LH	Kegiatan	2	2	2	2	LH
	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	Indikator global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan	LH	izin	4	22	24	25	27
	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
12.6 Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan transnasional untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang terregister.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	12.8.1	Sejumlah mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat dimana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan terregister	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan							
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Indikator global yang akan dikembangkan							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.	Indikator global yang akan dikembangkan							
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)										
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)							
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran serta kapabilitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi adaptasi pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi	Indikator global yang akan dikembangkan.							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dollar Amerika per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kaporalisasi dana tersebut sesegera mungkin	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia							
13.b Menggalakan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara urang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda serta masyarakat lokal dan marjinal	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia							
TUJUAN 14: EKOSISTEM LAUT DAN MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesair (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapanung	Indikator global yang akan dikembangkan.							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut, darat, dan perairan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
	14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	14.2.1 (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
14.6 Pada tahun 2020 melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak diaparkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memeringi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	14.6.1 (a)	Persentase kepemilikan pelaku usaha	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
14.7 Pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan budidaya air dan perikanan yang berkelanjutan.	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.							
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang alih teknologi kelautan untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fisher) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang termuat dalam the United Nation Convention on the Law of the sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dan : the future we want"	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	TUJUAN 15 - EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MEMINIMALKAN PEMANFAATAN BERKELAHUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGHULINAN, MEMULIKAN DEGRADASI LAHAN SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI)									
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Targat	Kode indikator	Indikator SOGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indikator global yang akan dikembangkan.							
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2030 melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi hidupan liar dan hasil perburuan atau perdagangan gelap	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	15.7.1 (a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
15.8 Pada tahun 2030, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dan jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.7.1 (b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
15.8 Pada tahun 2030, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dan jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1 (a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
15.9 Pada tahun 2030, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber daya untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	15.c.1 (a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana		
							2018	2019	2020		2021	
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELAMUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN)												
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan									
	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).									
	16.1.2	Kemertian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpecah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan									
	16.1.2 (a)	Kemertian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).									
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan									
	16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).									
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).		Satpol PP	kasus	135	140	110	70	30	Satpol PP
					Kesbang Politik	kasus	-	10	9	9	8	Kesbang Politik
	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyrksaan terhadap anak	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
		16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
16.2.1.(b)		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).									

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2021	
15.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan	15.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Inspektorat			4	2	2	3 Inspektorat
	15.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang dibetujuk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	16.6.1.(a)	Persentase peringatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	BKD		WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Selda		-	100% (9,00)	100% (9,20)	100% (9,40)	100% (9,60) Selda
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Inspektorat			-	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD Inspektorat
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Bagian Organisasi Selda Kabupaten Balangan			91,70%	91,75%	91,80%	91,85% Bagian Organisasi Selda Kabupaten Balangan
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	16.6.2.(e)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Indikasi Pelaksanaan	
							2018	2019	2020		2021
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, pengadilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Kesbang Politik	Persentase	-	90%	95%	-	Kesbang Politik	
	16.8.1	Proporsi koanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)		Dukcapil	Buah	186,026	3,500	5,000	4,000	Dukcapil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Setelah (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
						2016	2020	2021	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendatar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).						
	16.10.1	Jumlah kasus verifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.						
	16.10.1.(a)	Jumlah penahanan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).						
	16.10.1.(b)	Jumlah penahanan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).						
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).						
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).						
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PEID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Setuan	Bazeline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2020	2021	
16.11 Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)							
	16.b-1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pemabngunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Din. Sosial	KK		4000	4000	4000	Din. Sosial	
	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	Din. Sosial	Rumah		32	40	40	Din. Sosial	
	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirinya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan			67.79	68.16	68.41	68.76	Dinas Pendidikan

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	linas Kesehatan	%	0	92	95	98	100	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembali dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai: dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	Indikator global yang akan dikembangkan								

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

Target	Kode Indikator	Indikator SDG	Ketertarikan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi media.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator global yang akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang. menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk mengemukakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan dan aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelestarian untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	%	90	92	92	92	92	dinkes
	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	Kepedatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinkes	orang	29	39	44	50	50	dinkes
				dinkes	orang	15	27	27	27	27	dinkes
				dinkes	orang	16	37	45	50	50	dinkes

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baselins (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Indikator global yang akan dikembangkan.	dinkes	orang	9	22	31	40	50	dinkes
TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS, MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA)											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	106.01	106.11	106.24	106.44	106.66	-
	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	-	-	92.97	93.16	93.96	93.59	93.84	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2020	2021	
	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Indikator global yang akan dikembangkan.	Dinas Pendidikan	-	81	85	87	90	-
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	4.a.1*	Proporsi sekecil dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdin air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020	2021		
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)...	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.c Pada tahun 2020, secara signifikan meningkatkan pasokan guru berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan, guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan	%	42.46	43	44	45	45.5	Dinas Pendidikan	
TUJUAN 5: KESETERAPAN GENDER (MENCAPAI KESETERAPAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)												
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA	dokumen/Dt	0	0	1	1	1	DPPPA	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.1 (a)		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)			1.5	2.75	2.7	2.66	2.65	DPPPA	
						1	1.58	1.66	1.54	1.5	DPPPA	

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Puncapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA	-	0	100	100	100	100	DPPPA
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 (a)	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGMC, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPPA	%	0	30	30	30	DPPPA
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revisi dari konferensi konferensi tersebut	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	2021	
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai memiliki telepon genggam	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	-	-	-	-	-	-	-	-
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat akcasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRIK BAGIAN I: TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Periode			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).				59,99				
	7.1.2.*	Bauran energi terbarukan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	7.2.1	Termobilisasi dana per tahun [US \$] mulai tahun 2020 ekuitas menuju komitmen US \$100 Miliar	Indikator global yang akan dikembangkan.								
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat	7.3.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	7.3.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan	Indikator global yang akan dikembangkan.								
TUJUAN 8: PEMBERILAIAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MEMERIKAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELUSUP DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PENYERAPAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	dinas perdagangan	%		5,75	6,00	6,18	6,37	Dinas Perdagangan
				Pembah Belangan	%		6,36	6,41	6,46	6,51	Pembah Belangan

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Revisi (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
B.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	B.1.1 (a)	POB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pemkab Balangan	Juta (JP)		74.674.446,85	78.408.169,20	82.328.577,66	86.445.006,54	Pemkab Balangan
	B.2.1*	Laju pertumbuhan POB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan POB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Pemkab Balangan	Juta (JP)		22.393.900,72	23.513.595,75	24.689.379,54	25.923.739,32	Pemkab Balangan
B.3 Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	B.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Dinamidal & PTSP	%		5,00	5,00	5,00	5,00	Dinamidal & PTSP
	B.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional	Persen	22,50	23,88				BPS
	B.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional	Persen		98,95				
B.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produk, serta usaha melepas beban pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-year framework of Programs on Sustainable Consumption dan Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah	B.3.1 (c)	Pemertasa akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dikuperin	%		5,00	5,00	5,00	5,00	Dikuperin
	B.4.1	Jejak material (material footprint) yang dibuang selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	B.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	B.5.1*	Upah rata-rata per jam bekerja	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
B.5 pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	B.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Disketrans	%		3,03	2,95	2,85	2,75	Disketrans
	B.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional		8,93					BPS
B.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan dan pelatihan	B.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Angkatan Kerja Nasional			17,2				BPS

Tingkat	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Target Pencapaian				Indikator Pelaksanaan
				2018	2019	2020	2021	
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan layanan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perbudakan dan perdagangan tertara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengambil tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.					
	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal (dan non-fatal), berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.					
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan memaksa yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang mematuhi norma ILO	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (jeda di dalam lampiran perpres).					
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (bebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.					
8.9 Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (jeda di dalam lampiran perpres)					
	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (jeda di dalam lampiran perpres).					
	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (jeda di dalam lampiran perpres).					
			Indikator daerah sebagai proksi indikator nasional					
	8.9.1 (c)	Jumlah divisa sektor pariwisata	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)					

Tetapan	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Peningkatan			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
5.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang memiliki akses broadband.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	58,71	60,40			BPS
	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	24,52	28,89			BPS
TUJUAN 10: MERUKANINYA KESEKELUARAN (MENGUNAKAN INTRA DAN ANTAR NEGARA)										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)		0,411	0,310			BPS
	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)		5,68	5,59			BPS
	10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							BPS
	10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							BPS
	10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Target	Kode Indikator	Indikator SDG	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Kasidire (2017)	Target Partisipasi			Indikator Pelaksanaan	
							2018	2019	2020		
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres)								
	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa diskriminasi atau dicekikan dalam tahun 12 bulan terakhir atas dasar lanagan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).					65,56	65,59	65,65	DPPPA
	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diakreditasi dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perindugan sosial dari pembeta kerja terhadap PDB	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perindugan sosial pemerintah pusat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya	10.5.1	Financial Soundness Indicator	Indikator global yang akan dikembangkan.							
10.6.1		Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional	Indikator global yang akan dikembangkan.								

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Sifat	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2020		2021
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, bebas dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang berencana dan dikelola dengan baik	10.7.1	Proporsi biaya rekruitmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan								
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara B dengan negara tujuan penempatan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
	10.7.2 (b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKKM berdasarkan dupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).								
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization	10.a.1	Basaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
	10.b.1	Total aliran tumbandas yang masuk untuk pembangunan, terpalah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan rems, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.								
10.c Mempelbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya centami dari jumlah yang dikembalikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.								
TUJUAN 17: MEMBANGUN PARTNERIANSIP UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MEMULAIKANNYALAGI											
17.1 Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Bakenda	%		0,05	0,05	0,05	0,05	Bakenda
	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Bakenda	%		0,07	0,07	0,08	0,08	Bakenda
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								



Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance -ODA) termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang, penyedia ODA mendorong untuk memprioritaskan penempatan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan	Indikator global yang akan dikembangkan.							
	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.							
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber	17.3.2	Volume pengiriman uang/rembansi (dalam US dollar) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
	17.3.2 (a)	Proporsi volume remansi TK (dalam US dollar) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditunjukkan untuk membantu pembiayaan utang, kemitraan utang, dan restrukturisasi utang, yang sesuai dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan reformasi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan							
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berbasis keaslian, dan meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	17.6.1 (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Tritunggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	17.6.2	Layanan broadband internet tetap menurut tingkat kecapatannya.	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan							

Tingkat	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Basis Data (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana									
							2018	2019	2020										
17.5.2 (a)	17.5.2 (a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibu kota Kabupaten/Kota (IKK).	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan																
											17.5.2 (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan						
17.7.1	Total jumlah dana yang disalurkan untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendemonstrasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan																	
										17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).							
17.8.1 (a)	Persentase kabupaten 37 yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).																	
										17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular yang dikombinasikan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki probabilitas akan dikembangkan.							
17.9.1 (a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka ESST Indonesia	Indikator nasional sebagai probabilitas indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).																	
										17.10.1	Rata-rata tarif terbebas dunia Free Trade Agreement (FTA).	Indikator global yang memiliki probabilitas akan dikembangkan.							
17.10.1 (a)	Rata-rata tarif terbebas di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Indikator nasional sebagai probabilitas indikator global (ada di dalam lampiran perpres).																	
										17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Indikator global yang memiliki probabilitas akan dikembangkan.							
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai probabilitas indikator global (ada di dalam lampiran perpres).																	

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Isi/rincian	Sumber Data	Satuan	Kategori (2017)	Target Pembangunan			Instansi Pelaksana
							2018	2019	2020	
17.12 Merealisisasi pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa peraturan anutan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar	17.12.1	laju-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan							
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan	Indikator global yang akan dikembangkan							
17.15 Meningkatkan ruang kebijakan dan kepemimpinan dan setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengertasan/kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	17.15.1	Jangka waktu pengakuan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan							
17.16 Meningkatkan komitmen global untuk pembangunan berkelanjutan, dilindungi dengan komitmen sebagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan							
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kontribusi publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							
	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyajian proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).							

Taruhan	Kode Indikator	Indikator SDG	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Bersifat (2017)	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
							2018	2019	2021		
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terdapat berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan ketepatan data fundamental dari Statistik Resmi lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip fundamental dari Statistik Resmi	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	17.18.1 (a)	Persentase korumun Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS			100				
	17.18.1 (b)	Persentase korumun yang menyajikan data dan informasi statistik BPS sebagai tujuan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS				86,67			
	17.18.1 (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	BPS				5			
	17.18.1 (d)	Persentase indikator SDG terdapat yang relevan dengan target.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.18.2 (a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang dinilai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.								
	17.18.3 (a)	Teriusurnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								
	17.19 Pada tahun 2020, mengadopsi inovasi yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.							
17.19.1 (a)		Jumlah pejabat fungsional statistisi dan prajabatan komputer pada Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).								

Tetapan	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Penguasaan			Instansi Pelaksana		
							2018	2019	2020		2021	
	17.19.1 (b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistik dan/atau prajabatan komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).	BKPPD	%		48%	57%	65%	74%	BKPPD	
	17.19.1 (c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistik dan prajabatan komputer Kementerian/Lembaga	Indikator nasional yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan									
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan									
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).									
	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).									
	17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).	BPS			3865	3800				
	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).	BPS			96.05	96				
	17.19.2 (e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perspres).	BPS			71.23					

MATRIK BAGIAN II: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Basis (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020			
TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETEBERADAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)								
INDIKATOR SDGs : 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau								
INDIKATOR PROGRAM : Pemasangan jaringan pipa air minum yang berfungsi								
PROGRAM : Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku								
Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	km	1.437	1,8	1	1	9.620.000.000	APBD Kab. Belangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.1.1 (c) Proposal populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.								
INDIKATOR PROGRAM : Pemasangan jaringan pipa air minum yang berfungsi								
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih								
Kegiatan 1. Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	Jumlah sambungan rumah (SR)	1000	180	200	250	10.394.000.000	DAK Kab. Belangan	PUPR
Kegiatan 2. Pengembangan jaringan perpipaan distribusi air minum	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun	242762	7000	10000	13000	30.331.450.000	APBD Kab. Belangan	PUPR
Kegiatan 3. Pengembangan jaringan air minum sambungan rumah	Jumlah sambungan rumah (SR)	0	160	360	600	8.244.100.000	APBD Kab. Belangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.2.1 Proposal populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.								
INDIKATOR PROGRAM : Pemasangan prasarana MCK yang berfungsi								
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih								
Kegiatan 1. Penyediaan prasarana sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	18	10	10	10	10.669.270.000	APBD Kab. Belangan	PUPR
Kegiatan 2. Penyediaan sarana sanitasi	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1	1	1	1	2.552.550.000	APBD Kab. Belangan	PUPR
Kegiatan 3. Penyediaan prasarana sanitasi (DAK)	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	38	10	50	10	8.910.720.000	DAK Kab. Belangan	PUPR
INDIKATOR SDGs : 6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.								
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air								
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	Indeks	46	47	0	0	175.000.000	APBD Kab. Belangan	LH
INDIKATOR SDGs : 6.6.1 (e) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.								
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air								
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (hanya dilaksanakan pada tahun 2016)								
Program Kali Bersih (PROKASIH)	Jumlah sungai kali bersih (prokasi)	1	2	2	2	400.000.000	APBD Kab. Belangan	LH
TUJUAN 11: KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (MENJAMIN AKSES DAN PENYEDIAAN LAYANAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN)								
INDIKATOR SDGs : 11.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase rumah layak huni								
PROGRAM : Program Pengembangan Pemukiman								
Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MUR)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	18	-	45	45	3.378.715.600	APBD Kab. Belangan	Pemukim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran & Tahap (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2021			
			2018	2019	2021			
INDIKATOR SDGs : 11.3.1 (c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpetusi SPP.								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase kawasan kumuh yang tertangani								
PROGRAM : Program penanganan kawasan permukiman								
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan	Lokasi	1	1	1	3.044.419.006	APBD Kab. Balangan	Perkim	
PROGRAM : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan								
Kegiatan 1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	Lokasi	0	3	3	2.100.000.000	APBD Kab. Balangan	Perkim	
Kegiatan 2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Lokasi	14	30	50	3.986.579.226	APBD Kab. Balangan	Perkim	
Kegiatan 3. Pemeliharaan Drainase Lingkungan Kawasan Perumahan	Lokasi	0	1	1	2.100.000.000	APBD Kab. Balangan	Perkim	
INDIKATOR SDGs : 11.3.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Jelang : Dehub)								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap								
PROGRAM : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
Kegiatan Peningkatan jalan	km	30.646	2.555	20	172.576.522.600	APBD Kab. Balangan	PUPR	
INDIKATOR SDGs : 11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pemanganan sampah								
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas								
Kegiatan 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	%	8	12	18	1.220.000.000	APBD Kab. Balangan	LH	
Kegiatan 2. Pemeliharaan alat angkut sampah	bush	0	0	30	1.900.000.000	APBD Kab. Balangan	LH	
Kegiatan 3. Mengumpulkan dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA	ton	0	0	25	8.300.000.000	APBD Kab. Balangan	LH	
Kegiatan 4. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	paket	6	6	6	4.000.000.000	APBD Kab. Balangan	LH	
INDIKATOR SDGs : 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang								
PROGRAM : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
Kegiatan 1. Perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	duk	2	2	2	1.416.500.000	APBD Kab. Balangan	PUPR	
Kegiatan 2. Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	ha	4	1,5	0,5	5.971.100.000	APBD Kab. Balangan	PUPR	
TUJUAN 13 : (KONSUMSI DAN PRODUKSI) YANG BERTANGGUNG JAWAB; MELAKUKAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN								
INDIKATOR SDGs : 12.4.3 (e) Jumlah limbah B3 yang terakumulasi dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).								
INDIKATOR PROGRAM : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air								
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kegiatan	2	2	2	270.000.000	APBD Kab. Balangan	LH	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (8)
			2018	2019	2020			
INDIKATOR PROGRAM : Peningkatan penanganan sampah								
PROGRAM : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah								
Kegiatan Administrasi pembenahan limbah cair dan (B)	lot	4	22	34	35	37	APBD Kab. Blora	LH
jumlah usahakegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah								



MATRIK BAGIAN II: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Inclinit Anggaran Anggaran 0 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2020	2021			
TUJUAN II: TANGGA KEKONOMI (MENDAMPILAI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPULIN)								
INDIKATOR SDGs : 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
INDIKATOR PROGRAM : Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur								
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	%	4.73	4.54	-	-	Tahun 2018 : 3.552.870.000	APBN	BPS Kelsel
INDIKATOR SDGs : 1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat								
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat								
PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
Pembangunan gedung sekolah	ruang	6	6	6	6			
Penambahan ruang kelas sekolah	paket	20	20	20	20			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	paket	9500	9500	9500	9500			
Pengadaan perlengkapan sekolah	paket	249	249	249	249			
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	ruang	40	40	40	40			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	paket	3	3	3	3			
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	org	95	95	95	95			
Pelatihan penyusunan kurikulum	org	400	400	400	400			
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren selafiyah dan satuan pendidikan Non-islam setara SD dan SMP	sekolah	200	200	200	200			
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	paket	195	195	195	195			
Pembinaan kelengkapan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	sekolah	40	40	40	40			
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	org	800	800	800	800			
Penyediaan sarana dan fasilitas sebagai informasi pendidikan dasar	org	1500	1500	1500	1500			
Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	orang	525	525	525	525			
INDIKATOR SDGs : 1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat								
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat								
PROGRAM : Program Pendidikan Menengah								
Pembangunan gedung sekolah	buah	3	3	3	3			
Penambahan ruang kelas sekolah	buah	1	1	1	1			
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	buah	2	2	2	2			
Pembangunan perpustakaan sekolah	buah	2	2	2	2			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	paket	1	1	1	1			
Pengadaan perlengkapan sekolah	Paket	3	3	3	3			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	ruang	2	2	2	2			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Sasaran (2)	Target Tahunan (3)			Instansi/Alokasi Anggaran B. Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Penyelenggara (6)
		2018	2019	2020			
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		2018	2019	2020	2021		
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	org	360	360	360	360		
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem serta sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	sekolah	24	24	24	24		
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	kegiatan	5	5	5	5		
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	siswa	700	700	700	700		
TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN MENGLAKUKAN KEGIATAN, MENCAPAI REFORMASI PANGAN DAN GIZI YANG BAIK BERTU MENINGKATKAN PESTANAM BERKELANJUTAN.							
INDIKATOR SDGs : 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe							
INDIKATOR PROGRAM : Persentase Balita kurus (Wasting)							
PROGRAM : Perbaikan gizi masyarakat							
Kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Persentase Balita kurus mendapat makanan tambahan	80	85	90	95	4,034,931,000	Dinkes
Pembudayaan masyarakat untuk pentapaian keluarga sadar gizi	Jumlah desa UPG	1	2	2	3	548,562,550	Dinkes
Peningkatan gizi masyarakat	Cakupan partisipasi masyarakat (DVS)	78	80	82	85	408,434,400	Dinkes
PROGRAM : Perbaikan pelayanan kesehatan penduduk miskin							
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	Terlaksananya pelayanan yang komprehensif pada pasien gizi buruk/busung lapar	100	-	-	-	32,800,000	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil							
INDIKATOR PROGRAM : Persentase ibu hamil mendapat tablet tambah darah							
PROGRAM : Perbaikan gizi masyarakat							
Kegiatan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Persentase ibu hamil mendapat tablet tambah darah	92	95	98	100	1,348,061,000	Dinkes
TUJUAN 3: KEMUDIPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KESEHATAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESAWARTERAN SELURUH PENOLUK SEMUA USIA) BERKELANJUTAN.							
INDIKATOR SDGs : 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.							
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan keluarga oleh tenaga kesehatan							
PROGRAM : Program Kesehatan Keluarga							
Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin	Persentase cakupan KIA	-	100	100	100	2,988,266,395	Dinkes
Kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin (DAK)	Jumlah RTK	-	4	4	4	-	Dinkes
INDIKATOR PROGRAM : Jumlah kematian ibu							
PROGRAM : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
Kegiatan Audit Maternal Perinatal	Jumlah AMF tingkat kabupaten	18	-	-	-	181,170,800	Dinkes
Kegiatan pertolongan persalinan bag ibu hamil (DAK)	Jumlah RTK	4	-	-	-	3,779,239,000	Dinkes
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan ibu dan anak	Persalinan tenaga kesehatan	100	-	-	-	66,824,600	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.2.2 (e) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH							
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan keluarga oleh tenaga kesehatan							
PROGRAM : Program Kesehatan Keluarga							
Kegiatan Pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	100	100	100	3,581,934,630	Dinkes
INDIKATOR PROGRAM : Persentase pelayanan kesehatan bayi							
PROGRAM : Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Sasaran (2)	Baseline (2017)		Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp : M)	Sumber Penerimaan (4)	Instansi Pelaksana (5)
		2018	2019	2020	2021	2021			
Kegiatan penyuluhan kesehatan anak Balita	Kelas	15	-	-	-	-	190.172,600	APBD Dinkes	Dinkes
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak	Orang	15	-	-	-	-	321.788,800	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									
INDIKATOR PROGRAM : persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap									
PROGRAM : Program Surveilans dan Imunisasi Kegiatan 1 : Peningkatan Imunisasi	%	80.1	84	85	86	86	3.347,237,500	APBN	BPS Kabell
PROG-RAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular									
Kegiatan imunisasi	Jumlah bayi, Balita, anak SD/pendek, WUS, bumil dan anak usia 0 bulan sampai dengan kurang 15 tahun yang mendapat pelayanan imunisasi	36,956	-	-	-	-	905,554,700	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.1.(e) Prevalensi HIV pada populasi dewasa									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengendalian penyakit menular langung (P2ML)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	2.364,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.2.(e) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengendalian penyakit menular langung (P2ML)	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100	100	100	2.364,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Persen	2	1	1	1	1	3.202,992,147	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.3.6* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusut).									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penderita TB, DBD, malaria yang tertangani									
PROGRAM : Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengendalian penyakit sumber binatang (P2SB)	Angka cakupan pengobatan massal filariasis	85	86	87	89	89	3.202,992,147	APBD Dinkes	Dinkes
Pengendalian penyakit menular langung (P2PMG)	CDR kusta/100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2.564,874,910	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.6.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									
INDIKATOR PROGRAM : Cakupan pembiayaan jaminan kesehatan									
PROGRAM : Penguatan jaminan kesehatan dan dukungan finansial untuk penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah	100	100	100	100	100	115.500,000,000	APBD Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.									
INDIKATOR PROGRAM : Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BIM-IP dan vaksin 80%									
PROGRAM : Obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	12	12	12	12	12	13.973,093,500	APBD Dinkes	Dinkes
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan	120	120	120	120	120	415,173,600	APBD Dinkes	Dinkes

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Sasaran (2)	Standarisasi (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alokasi Anggaran \$ Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Maksud Pelaksanaan (6)
			2019	2020	2021			
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Persentase		100	100	100	161,649,450	APBD Dinkes	Dinkes
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase		100	100	100	1,062,668,945	APBD Dinkes	Dinkes
TUJUAN 3: PENDINGINAN BERKUALITAS WENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MERATA SERTA MENYINGKATKAN KEBERPIKAYAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA								
INDIKATOR SDGs : 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SDMI/SeDerajat.								
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) SDMI/SeDerajat.								
PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
Pembangunan gedung sekolah	ruang		6	6	6			
Penambahan ruang kelas sekolah	paket		20	20	20			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	paket		9500	9500	9500			
Pengadaan perlengkapan sekolah	paket		249	249	249			
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	ruang		40	40	40			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	paket		3	3	3			
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	org		95	95	95			
Pelatihan penyusunan kurikulum	org		400	400	400			
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-islam setara SD dan SMP	sekolah		200	200	200			
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	paket		195	195	195			
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	sekolah		40	40	40			
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	org		800	800	800			
Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	org		1500	1500	1500			
Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Siswa	orang		525	525	525			
INDIKATOR SDGs : 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SeDerajat								
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SeDerajat								
PROGRAM : Program Pendidikan Menengah								
Pembangunan gedung sekolah	bush		3	3	3			
Penambahan ruang kelas sekolah	bush		1	1	1			
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	bush		2	2	2			
Pembangunan perpustakaan sekolah	bush		2	2	2			
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	paket		1	1	1			
Pengadaan perlengkapan sekolah	Paket		3	3	3			
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	ruang		2	2	2			
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	org		360	360	360			

Program/Kejadian/Insidensi/ Kegiatan (1)	Estimasi (2017)	Target Tahunan (3)			Indikasi Asesasi Anggaran 5 Tahun (Rp.) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksanaan (6)
		2018	2019	2020			
Pembinaan kelembagaan sekolah dan managem serta sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)		24	24	24	24		
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Terlaksananya pembinaan Manajemen Sekolah Terasiasasinya Informasi tentang kebijakan-kebijakan baru pendidikan	5	5	5	5		
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Terlaksananya lomba OSN, O2SN, FLS2N dan Lomba UKS	700	700	700	700		
INDIKATOR SDGs : 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
INDIKATOR PROGRAM : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
PROGRAM : Program Pendidikan Anak Usia Dini							
Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	1	1	1	8		Dinas Pendidikan
Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas	2	1	1	8		Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya sejumlah alat praktek dan peraga untuk siswa	2	6	8	8		Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah pendidik yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	0	635	635	635		Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terpenuhi semua biaya operasional PAUD Negeri pembina, TK Harapan Bangsa SKB	6	8	8	8		Dinas Pendidikan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik yang mendapatkan pelatihan kurikulum dan pembelajaran	635	635	635	635		Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs : 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.							
INDIKATOR PROGRAM : 1. Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
2. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
3. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
PROGRAM : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru bersertifikat	686	686	686	686		Dinas Pendidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidik	600	600	600	600		Dinas Pendidikan
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Peningkatan kualitas tugas dan kompetensi/kurafitas guru	40	40	40	40		Dinas Pendidikan
Pesialan angka kredit jabatan fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	1.800	1.800	1.800	1.800		Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs : 4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahinmampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin							
INDIKATOR PROGRAM : Peningkatan kualitas, keterampilan KF dan angka melek huruf							
PROGRAM : Program Pendidikan Non Formal							
Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah warga KF yang mendapatkan pendidikan keaksaraan	3050	0	70	60		
Peaksanaan Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA	Jumlah penyelesaian Paket A, Paket B dan Paket C	3	3	3	3		
TULUM 5: KEBETARAKAN GENDER: MENGAJAI KEBETARAKAN GENDER DAN MEMERDAYAKAN PEREMPUAN							
INDIKATOR SDGs : 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan							
INDIKATOR PROGRAM : Jumlah dokumen/draft kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan							
Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah dokumen/draft kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	0	0	1	1		
INDIKATOR SDGs : 5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.							
INDIKATOR PROGRAM : Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO							
PROGRAM : Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Saluran (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Indikator Alaplas Anggaran \$ Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020			
Pelayanan Pendampingan (Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum dan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Persentase	0	0	100	100	100		
Pelayanan Pendampingan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	0	0	100	100	100		
INDIKATOR SDGs : 5.5.1* Proposal kural yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.								
INDIKATOR PROGRAM : Persentase keterlibatan perempuan di parlemen								
PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan								
Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Orang	0	0	100	100	100		
Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan	Orang	0	0	50	50	50		



Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2017)	Target Tahunan (3)			Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2018	2019	2020			
PROGRAM: Pembinaan Perkebunan								
Kegiatan 1 : Polikultur KKK								
	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	1	-	-	80,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Ring 1 dan Ring 2	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 2 : Pemeliharaan Kebun Koleksi	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	1	1	-	-	90,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Gempa	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 3 : Bantuan Saprodi Peninggalan Jamur Akar Putih	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	1	-	-	75,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Banuh Bahinu Dalam, Pamurus, Munung Abuin, Balida, Maredap	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 4 : Peningkatan Mutu Beker	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	1	1	-	-	117,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Kabupaten Balangan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 5 : Budidaya Lada	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	1	1	-	-	28,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Kabupaten Balangan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 6 : Bantuan Bibit Durian Unggul	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	1	-	-	25,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Helong	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
Kegiatan 7 : Kebun Karet Unggulan Balangan	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	1	1	-	-	253,000,000 PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja	Desa Ring 1 dan Ring 2, Desa Tewahan	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja



f